

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA DI DESA WATUDANDANG**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Farihy

NIM. 05010422003



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Farihy
NIM : 05010421003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Watudandang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2026

Yang menyatakan,



NIM. 05010422003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Farihy

NIM : 05010422003

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Dalam UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa: Studi Praktik Politik Dinasti Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Watudandang

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Farihy

NIM. : 05010422003

Judul : Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Di
Desa Watudandang

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji III



Ahmad Fathan Aniq, MA.

NIP. 198401072009011006

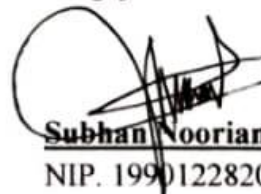
Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 10 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Farihy.....
NIM : 05010422003.....
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara.....
E-mail address : farihammad121@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SYĀSAH* TERHADAP PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA
WATUDANDANG


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2026

Penulis


(Ahmad Farihy)

ABSTRAK

Praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk menimbulkan polemik karena diduga mengandung unsur nepotisme akibat adanya hubungan kekerabatan antara kepala desa dan sekretaris desa yang diangkat. Meskipun secara formal pengangkatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022, praktiknya menimbulkan persepsi konflik kepentingan serta dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*, kondisi tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-‘adl*), musyawarah (*al-shūrā*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang ditinjau dengan perspektif *good governance*, dan (2) Bagaimana *fiqh siyāsah* memandang pengaturan pengangkatan perangkat desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 serta implementasinya di Desa Watudandang.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kasus (*case study approach*). Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait di Desa Watudandang, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).

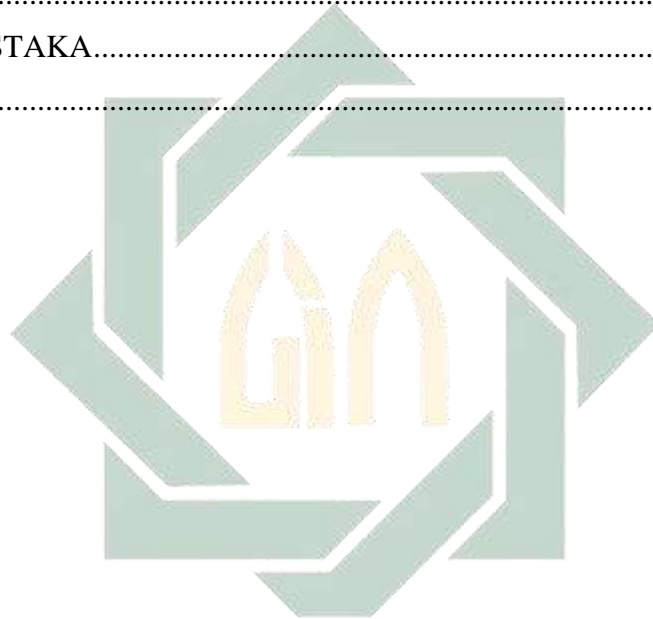
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang tidak sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022, khususnya terkait larangan hubungan derajat kesatu antara calon perangkat desa dan panitia pengisian perangkat desa. Dari perspektif *good governance*, proses tersebut belum mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara optimal, sehingga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*, pengangkatan tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-‘adl*), musyawarah (*ash-shūrā*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*), karena jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi dan kemaslahatan umat, bukan pertimbangan kekerabatan.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengangkatan perangkat desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara substantif agar sesuai dengan prinsip *good governance*. Integrasi nilai-nilai *fiqh siyāsah dustūriyah* sebagai landasan etis juga penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional.....	18
I. Metode Penelitian.....	20
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i> , PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>	26
A. Teori Good Governance	26
B. Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan 34	
C. Teori Fiqh Siyāsah.....	39
BAB III PRAKTIK PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA WATUDANDANG	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Proses Pengangkatan Perangkat Desa	53
BAB IV ANALISIS <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA WATUDANDANG	60

A. Analisis Praktik Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dalam perspektif <i>Good Governance</i>	60
B. Bagaimana tinjauan <i>fiqh siyāsah</i> terhadap pengaturan pengangkatan perangkat desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 dan implementasinya di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.....	67
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

Asmawi. *Perbandingan ushul fiqh*. Jakarta: amzah, 2011.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan
1. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
Prenadama Group, 2017.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan
Gabungan*. 1st ed. Gresik: Unigres Press, 2022.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran
Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. 1st ed.
Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.

Tutik, Titik Triwulan and Widodo, Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 1st ed. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011.

Jurnal

Putri, Adinda Dwi. “Fiqih Siyāsah Dalam Pembelajaran Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024).

Bintang, Ahdian Syah Putra. “Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyāsah.” *TABAYYUN: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

Hakim, Ahmad Burhan dan Satriyo Pringgo Sejati. “Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Pesrspektif Siyāsah Dustūriyah.” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024).

Sugitanata, Arif dan Rizal Al Hamid. “Politik Dinasti Dan Regresi Demokrasi Di Indonesia: Analisis Pelantikan Gibran Rakabuming Raka Dalam Perspektif Maşlahah Mursalah.” *Siyāsah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2025): 50–70. <https://doi.org/10.32332/sn19mp69>.

Arifin, Firdaus. “Politik Dinasti Dan Pembaruan Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2025): 636–65.

Atmojo, Muhammad Eko, and Vindhya Putri Pratiwi. “The Implementation of a Merit System in the Selection of Village Officers in the Indonesian Region of Yogyakarta.” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 8, no. 2 (October 2020): 134–41. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3695>.

Gunawan, Deni Riski. "Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong." Skripsi, IAIN Curup, 2025.

Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1, no. 1 (2023)

Kapojos, Marcella J., Dani R. Pinasang, and Donna O. Setiabudhi. *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. no. 1 (2022).

Kholis, Nur. "Politik Dinasti DI Indonesia Dalam Perspektif Politik Dinasti." Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 70. 2024.

Kirana Utami, Tanti, Nazwa St May, Siti Nurajjah, Helmi Al Zaidan, Farrel Meika Putra Hendrawan, and M. Algi Fahril. "Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (December 2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3421>.

Lubis, Gusni, Hasnul Arifin Melayu, and Azka Amalia Jihad. "The Relevance of Imam Al-Māwardī's Thought to the Legislative Process of Aceh's Qanun by the Aceh People's Representative Council." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 28, 2025, 179–90. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4627>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Nabilah, Andi Alya, Gusnata Gusnata, and Kurniati Kurniati. "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (June 2024): 193–201. <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.

Raissoevel, Noer Fadilah. "Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2022.

Hidayah, Nur. "Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah." Skripsi IAIN Palopo, 23. 2022.

Nurfatima, M. Taufin, and M. Taufik. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyāsah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 226.

Ratika, Hartiwi Herap. "Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Prespektif Siyāsah Tanfidziyah." Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2025

Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya: Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (April 2021): 28–41. <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.

Riswandi, Dendi. “Analisis Kedudukan Alquran, Sunnah Dan Akal Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Musyarokah* 2, no. 2 (2024).

Rosyada, Ayu Amrina. “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda.” *Journal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (n.d.): 108.

Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, and Syahrul Alif Rozaq. “Al-Qur’an sebagai Sumber Hukum Al-Qur’an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam.” *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (December 2024): 34–44.
<https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074>.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (March 2018).
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.

Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Utami, Wafiq Fadilah, and Mu’min Firmansyah. “Application of Fiqh Siyāsah in the Field of Constitution.” *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan*

Politik Islam 9, no. 2 (August 2024): 132.
<https://doi.org/10.29300/imr.v9i2.5140>.

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyāsah.” *ALIMARAH* Volume 2, no. 2 (n.d.): 131.

Yasin, Ikhsan. “Eksistensi AAUPB di Indonesia dan Yurisprudensinya Dalam Perkara TUN.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (October 2018): 296–317. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.296-317>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2024.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Wawancara

Mujiyanto, Kasi Kesra Kecamatan Prambon, Wawancara, Januari 16, 2026

Masduki, Masyarakat, Wawancara January 22, 2026.

Tohari, Hamim. Kaur Keuangan, Wawancara, January 21, 2026

Sucipto. Kepala Desa Watudandang, Wawancara January 21, 2026

Linda, Tokoh Pemuda, Wawancara January 18, 2026.

Mahfudz, Ali. Tokoh Masyarakat, Wawancara, January 22, 2026.

Gholib, Ahmad. Tokoh Masyarakat, January 18, 2026, Wawancara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A